

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut teori keagenan (*agency theory*), adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problems*), yaitu ketidak sejajaran kepentingan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajer). Jensen dan Meckling (1976) dalam Puspa (2003) memandang baik *principal* dan *agent* merupakan pemaksimum kesejahteraan, sehingga ada kemungkinan besar bahwa *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari *principal*. Konflik ini juga tidak terlepas dari kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*) dengan mengorbankan kepentingan pihak lain, karena walaupun manajer memperoleh kompensasi dari pekerjaannya, namun pada kenyataannya perubahan kemakmuran manajer sangat kecil dibandingkan perubahan kemakmuran pemilik/pemegang saham (Puspa, 2003 : 176).

Menurut Jeffrio (2011), Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya (Jeffrio, 2011 : 13).

Berdasarkan sifat yang hanya mementingkan dirinya sendiri itulah manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa yaitu pemanfaatan keadaan untuk melakukan manajemen laba (Boediono, 2005).

Menurut Purnomo (2009) dalam Kustinah (2011) menyatakan, dalam melakukan perekayasa atas laporan keuangan, terdapat beberapa teknik yang mungkin dilakukan manajer dalam melakukan manajemen laba diantaranya, (1) Manajemen Akrual (*Accrual Management*) yang berkaitan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas, (2) Penetapan Kebijakan Akuntansi Wajib (*Adoption of Mandatory Accounting Changes*) yang berkaitan dengan suatu kebijakan akuntansi yang wajib dilakukan oleh perusahaan, (3) Perubahan Akuntansi Secara Sukarela (*Voluntary Accounting Changes*) yang berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metoda akuntansi tertentu diantara sekian banyak metoda yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) (Kustinah, 2011 : 128).

Untuk mendeteksi ada tidaknya manajemen laba, maka pengukuran atas akrual adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pada praktiknya, manajemen laba merupakan manajemen akrual. Dalam mendeteksi manajemen laba para banyak peneliti menggunakan beberapa model yang telah diulaskan oleh beberapa ahli terdahulu. Model Healy (1985) yang merupakan model awal dalam pendeteksian manajemen laba. Healy (1985) memprediksi bahwa manajer secara

oportunistik mengelola income bersih untuk memaksimalkan bonus mereka dibawah rencana kompensasi perusahaan. Dalam menentukan ukuran manajemen laba menggunakan cara membandingkan rata-rata total akrual (dibagi total aset periode sebelumnya). Model De Angelo (1986) menguji manajemen laba dengan menghitung perbedaan awal dalam *total accrual* dan dengan asumsi bahwa perbedaan pertama tersebut diharapkan nol (0), yang berarti tidak ada manajemen laba. Model Jones (1991) dalam menentukan manajemen laba dengan menambahkan akrual total keseluruhan dan pengembalian saham keseluruhan sebagai dua variabel penjelasan tambahan serta menggantikan perubahan penjualan dalam model Jones dengan penjualan tunai (Siswardika, 2012 : 136-146).

Berdasarkan model Jones (1991) banyak dilakukan modifikasi-modifikasi dari berbagai ahli. Dalam Model Modifikasi Jones secara implisit berasumsi bahwa seluruh perubahan dalam penjualan kredit di periode peristiwa berasal dari manajemen laba. Industri Adjusted Model, model ini berasumsi bahwa variasi dalam penentuan akrual bukan pilihan adalah umum terjadi diantara perusahaan dalam industri yang sama. Selanjutnya Model kang dan Sivaramakrishnan (1995) dalam model Kang dan Sivaramakrishnan bergantung pada pendekatan alternatif yang dalam hal ini, (a) mengestimasi akrual yang dikelola dengan menggunakan tingkatan daripada menggunakan perubahan dalam aset lancar dan utang lancar, (b) mencakup harga pokok penjualan dan juga beban lain-lain, dan (c) tidak membutuhkan regresi menjadi tidak terkontaminasi. Terakhir model Khotari (2005), model ini mengestimasi model yang serupa dengan Jones dan model *modified jones*, namun memasukkan ROAit (Return on Asset) atau RORit-1. Pendekatan ini didesain untuk

memasukkan *performance measure* dalam regresi akrual. (Siswardika, 2012 : 136-146).

Banyaknya pertentangan mengenai manajemen laba terkait apakah manajemen laba ini dapat dibenarkan atau merupakan manipulasi terhadap riil aktivitas dan bisnis. Manajemen laba sudah menjadi fenomena umum yang terjadi di berbagai negara. Praktik tersebut menuai banyak diskusi, penelitian dan juga kontroversi. Perbedaan pendapat antara akademisi, praktisi, dan regulator membuahkan persepsi yang sangat berbeda dalam memandang persoalan manajemen laba (Jeffrio, 2011)

Richardson (1998) dalam Jeffrio (2011) mengemukakan bahwa dari beberapa studi menunjukkan kemungkinan terjadinya intervensi pihak manajemen dalam proses laporan keuangan yang tidak saja melalui keputusan operasional, tetapi melalui estimasi dan metode akuntansi yang digunakan. Misalnya, Standart Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan ruang bagi manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi yang lebih merepresentasikan keadaan perusahaan sesungguhnya sehingga ruang ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba. Hal ini lebih dimungkinkan lagi ketika informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya, yang dikenal sebagai asimetri informasi (Jeffrio, 2011 : 2).

Menurut Millstein (1999) dalam Jeffrio (2011), untuk mengurangi perilaku manajemen laba, perlu dilakukan mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* telah muncul pada tahun 1970-an ketika ada permasalahan dalam pelaporan keuangan. Menurut Forum For Corporate In Indonesia (FCGI) (2000)

dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury Committee mendefinisikan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan extern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Secara lebih rinci, terminologi *corporate governance* dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dari perilaku dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan, dan pemegang saham. (FCGI, 2000 : 1)

Pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba, baik di Indonesia maupun di luar negeri telah dibuktikan oleh beberapa peneliti. Di Indonesia, Ujiyantho dan Bambang (2007) menganalisis mengenai mekanisme *corporate governance*, manajemen laba dan kinerja keuangan (studi pada perusahaan go publik sektor manufaktur), menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Jeffrio (2011). Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial, praktik manajemen laba akan semakin berkurang. Sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial akan meningkatkan praktik manajemen laba. Selain itu, Ujiyantho (2007) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut mendukung dengan hasil penelitian Jeffrio (2011) yang

menyatakan bahwa berapapun persentase kepemilikan institusional tidak akan memengaruhi manajemen laba.

Bayu (2012) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh *corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan direksi, komite audit, dewan komisaris independen, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dewan komisaris independen, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan dengan manajemen laba, sedangkan ukuran dewan direksi, komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bayu, 2012).

Penelitian mengenai hubungan dewan direksi yang dilakukan oleh Bayu (2012) didukung oleh Jeffrio (2011) yang juga menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Ujiyantho (2007), yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Alasan lain yang digunakan manajemen melakukan tindakan manajemen laba adalah ketika munculnya risiko keuangan tinggi karena tidak dikelola dengan baik. Jeffrio (2011) dalam penelitiannya mengenai hubungan rasio keuangan yang menggunakan proksi atas *leverage*, arus kas bebas, dan rasio lancar terhadap manajemen laba menyatakan bahwa hanya rasio lancar yang memiliki pengaruh positif, sedangkan rasio *laverage* dan arus kas bebas berpengaruh negatif terhadap

manajemen laba. Di sisi lain penelitian Tarjo (2008) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Jiambalvo (1996) dalam Jeffrio (2011) mengatakan, rasio *leverage* mengukur sejauh mana aktiva perusahaan telah dibiayai oleh penggunaan hutang. Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi akibat besarnya jumlah hutang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pada waktunya. Perusahaan akan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba. Tingginya rasio *laverage* mendorong manajemen melakukan manipulasi laba agar terhindar dari pelanggaran perjanjian hutang (Jeffrio, 2011 : 6).

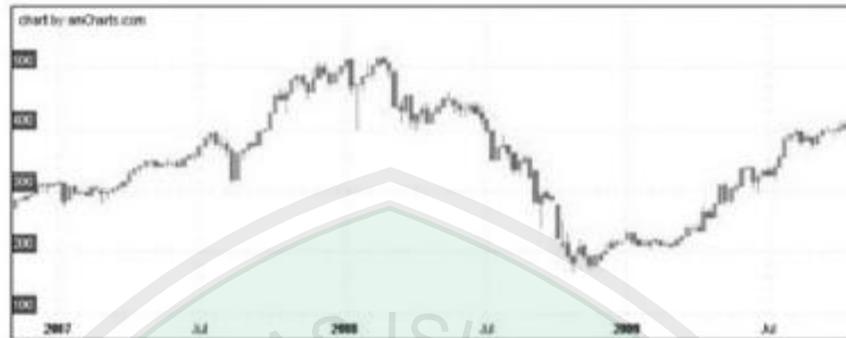
Dalam kebanyakan penelitian yang dilakukan lebih banyak mengambil sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Untuk itu peneliti sekarang ingin menekankan penelitian yang berobjek pada perusahaan yang memiliki karakteristik khusus semisal saham yang tergolong saham syariah. Jakarta Islamic Indeks atau JII merupakan benchmark investasi syariah atau indeks syariah yang dioperasikan pada perdagangan reguler atas panduan dari Dewan Syariah Nasional MUI. Saham-saham yang masuk kriteria JII adalah saham-saham yang operasionalnya tidak mengandung unsur *ribawi*, permodalan perusahaan juga bukan mayoritas dari hutang. Jadi bisa kita katakan bahwa saham-saham yang tergabung dalam JII ini adalah saham-saham yang pengelolaan dan manajemennya terbilang sudah transparan. Serta saham-saham yang akan masuk ke JII harus melalui filter syariah terlebih dahulu. Dalam melaksanakan pengawasannya perusahaan yang masuk kedalam JII harus melalui

BAPEPAM, PT Danareksa Investment Management (PT DIM), serta bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional yaitu MUI. Serta merupakan saham yang termasuk 10 kapitalisasi pasar terbesar selama 1 (satu) tahun terakhir dan memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%. Diharapkan dengan adanya filter ini perusahaan yang masuk ke JII terbebas dari manipulasi laba atau manajemen laba.

Menurut hasil pantauan BEI (2009), selama tiga tahun terakhir sejak pertengahan 2007 sampai dengan oktober 2009, indeks JII menunjukkan pola pergerakan yang sangat fluktuatif dalam rentang (*range*) yang sangat besar. Setelah berhasil mencapai break high sepanjang sejarah pasar modal pada level 521,433, indeks JII ikut terperosok jatuh begitu dalam akibat krisis ekonomi global yang dipicu oleh memburuknya perekonomian AS dan sebagian Eropa. Krisis ekonomi global yang dipicu oleh kehancuran “Backed Securities” dengan underlying kredit perumahan kualitas rendah (*subprime mortgage*). Indeks JII anjlok sangat dalam hingga mencapai level terendahnya 166,917 pada September 2008. Saham-saham dalam JII yang selama ini menjadi motor penggerak indeks justru menjadi sumber kejatuhan hingga level terburuk sejak 2004.

Setelah perekonomian dunia mulai mengalami pemuliharaan kembali pada Maret-Agustus 2009, indeks JII yang dimotori oleh saham *blue chips* kembali menunjukkan kekuatan kinerja fundamentalnya. Indeks JII pun bangkit kembali secara konsisten hingga mencapai level pemulihan yang cukup baik, yaitu di posisi 383,665. Berikut pergerakan indeks JII pada tahun 2007-2009 :

Gambar 1.1 Pergerakan Indeks JII 2007-2009



Sumber : BEI 2009

Dilain pihak menurut Wahyu Sidarta, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2010 di kisaran 5-6 persen yang dihitung berdasarkan perekonomian tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi tersebut pastinya akan mendorong kegiatan ekspor dan tentunya impor akan positif lagi, berdampak juga bagi investasi dalam maupun luar negeri. Jika melihat *Top Ten* JII, sebagian besar didominasi oleh sektor agrikultural dan pertambangan. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi global saat ini telah membuat harga – harga komoditi terus melonjak, seperti minyak mentah yang sempat menyentuh kisaran US\$80/barel atau US\$0,504/liter (Rp. 4.700,-/liter). Harga emas pun saat ini diperdagangkan pada kisaran harga US\$34/gram (Rp. 320.000,-/gram). Seiring dengan harga minyak, harga komoditi lainnya diperkirakan masih akan terus menanjak tinggi, terutama saat ini yang menjadi “selebritis” tanah air maupun global adalah minyak kelapa sawit dan batu bara. Kedua komoditi tersebut merupakan salah satu ekspor utama Indonesia, yang dimana cukup diminati oleh negeri asing.

Bertolak ukur pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jeffrio (2011) yang meneliti pengaruh *corporate governance*, risiko keuangan, dan struktur

kepemilikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan menggunakan indikator kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris sebagai proksi *corporate governance* dan menggunakan model Kang dan Sivaramakhrisnan (1995) sebagai metode mendeteksi manajemen laba. Peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai hubungan *corporate governance* dengan proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan rasio *leverage* terhadap manajemen laba, karena variabel-variabel tersebut merupakan variabel yang berpengaruh terhadap manajemen laba dan menuai hasil berbeda-beda dari penelitian sebelumnya.

Penekanan yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan melihat objek penelitian yang memfokuskan pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2007-2011 karena dalam indeks JII yang telah dijelaskan diatas mengalami pergerakan saham yang fluktuatif di tahun penelitian dan juga dikarenakan saham yang masuk kedalam JII tidak mengandung unsur spekulatif maupun keuntungan yang tetap, sehingga perusahaan akan adil dalam pembagian keuntungan, serta belum banyak peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian yang mengambil saham yang berbasis syariah kedalam objek penelitiannya, sehingga diharapkan mampu memberikan bukti yang lebih akurat pengaruh *corporate governance* dan rasio *leverage* pada perusahaan yang termasuk perusahaan berbasis syariah.

Dalam menentukan ukuran manajemen laba, peneliti menggunakan model Kothari (2005) yang disarankan oleh Jeffrio (2011). Arifin (2012) menyatakan,

model Kothari merupakan model yang memiliki daya prediksi yang lebih kuat dibandingkan dengan model sebelumnya, model Kothari dapat memberikan tambahan kontrol terhadap proksi manipulasi laba. Latar belakang Kothari et al (2005) dalam menggunakan ROA sebagai variabel yang cocok daripada variabel lainnya (misalnya, ukuran, pertumbuhan laba, hasil pendapatan, market-to-book, dll) dalam menentukan akrual diskresioner. Pertama, Dechow et al. (1998) dalam model akrual dalam pembahasannya, menunjukkan kontrol ROA untuk efek kinerja diukur akrual diskresioner. Kedua, Barber dan Lyon (1996) menggunakan pendekatan ROA untuk mendeteksi kinerja operasi normal (Barber dan Lyon tidak fokus pada akrual) menggunakan desain penelitian dalam perusahaan yang diteliti. Dalam penelitiannya menemukan bahwa mengukur kinerja operasi dengan menggunakan ROA cenderung lebih baik daripada menggunakan variabel lain. Kothari et al. (2005) menemukan bahwa menggunakan ROAt tahun berjalan lebih baik daripada ROAt-1 tahun sebelumnya. Dengan demikian, diperkirakan discretionary accrual lebih terkontrol dalam perusahaan yang diteliti (Kothari et al, 2005).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Corporate Governance* dan Rasio *Leverage* Terhadap manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII))”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *corporate governance* dan rasio *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2007-2011?
2. Apakah *corporate governance* dan rasio *leverage* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2007-2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah diungkapkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* dan rasio *leverage* secara parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2007-2011.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* dan rasio *leverage* secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2007-2011?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan pembelajaran dan tambahan pengetahuan dalam kajian akuntansi keuangan mengenai hubungan *corporate governance* dan rasio *leverage* terhadap manajemen laba.

2 Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa atau mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama kajian mengenai akuntansi keuangan yaitu hubungan *corporate governance* dan rasio *leverage* terhadap manajemen laba.

3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memperhatikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

3.1 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman sesuai yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini terdapat batasan yang ditetapkan, yaitu:

1. Objek penelitian yang dipilih adalah perusahaan yang secara konsisten atau telah stabil terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2007-2011.
2. Ada tidaknya pengaruh signifikan terhadap manajemen laba diprosikan oleh proksi *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan proksi rasio *leverage* yaitu rasio *leverage*.

3. Data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini adalah laporan keuangan pada seluruh perusahaan yang konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2007-2011 yang diperoleh dari situs BEI.

